

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aprizal. *Hukum Adat Indonesia*. Diedit oleh Syafrani dan H. Iriansyah. 1 ed. Sleman: Deepublish, 2021.

Griffin, Carl J, Roy Jones, dan Iain J. M. Robertson, ed. *Moral Ecologies: Histories of Conservation, Dispossession and Resistance (Palgrave Studies in World Environmental History)*. 1st ed. 20. Wellington: Palgrave Macmillan, 2019.

Komnas HAM. *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Diedit oleh Eko Cahyono, Ana Mariana, Siti Maimunah, Muntaza Erwas, Yesua Y.D.K Pellokila, Winna Khairina, Saurlin Siagian, et al. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Moh Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.

Nawawi Aried, Barda. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998.

———. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. 2 ed. Semarang: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Neethling, J, dan J M Potgieter. *Law of Delict*. Diedit oleh Lisa Stanford. Seventh

- Ed. Durban, 2014.
- Peide, A. Suriyaman Mustari. *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2015.
- Hafrida dan Usman, “Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana,” 2024.
- Ravena, Dey, dan Kristian. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Edisi Revi. Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.
- Tim Inkuiri Nasional Komnas Ham. *Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016.
- Tongat. *Hukum Pidana Materiil*. Cetakan Ke. Malang: UMM Press, 2003.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Diedit oleh M Rizki Azmi. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Jurnal/Artikel

Atifah, Nurul Rezky. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penggusuran Paksa.” *Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021).

Bawole, Grace Yurico. “Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability dan Vicarious Liability.” *Lex Et Societas* VI, no. 8 (2018): 16–20.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v6i8.23280>.

Haekal, Luthfian, dan Pungky Erfika Suci. “Kuasa dan Eksklusi REDD+ sebagai ‘Climate Leviathan’ dan Ahli Fungsi Lahan di Indonesia.” *BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia* 1, no. 1 (2018).

Prananingrum, Dyah Hapsari. “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 73–92. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92>.

Randy Zethdan Pellokila, Jordan. “Analisis Penyelesaian Konflik Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Jayapura Papua.” *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 08 (2021): 1111–23.
<https://doi.org/10.46799/jst.v2i8.330>.

Samosir, Djamanat. “Legalisasi hak ulayat masyarakat hukum adat.” *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 2 (2013): 236–43.
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>.

Sugangga, I.G.N. *Pengantar Hukum Adat*. 1 ed. Semarang: Badan Penerbit

Universitas Diponegoro, 1994.

Tanjung, Albert. “Kedudukan Hutan Adat Di Atas Tanah Ulayat dalam Pemanfaatan Hutan.” *Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 1 (2019): 137–48.

Thontowi, Jawahir. “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya.” *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (2015): 1–13. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>.

Widowaty, Yeni, Gatot Supangkat Samidjo, dan Dakha Hadi Nugraha.

“Application of Strict Liability Principles Against Illegal Karst Rock Mining Leading to Environmental Damage.” *E3S Web of Conferences* 316 (2021): 10. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131604008>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perkebunan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998 Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2015 tentang Hutan HAK

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644K/Pid/1988

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU/-X/2012

Sumber Internet

Kalami, Tori, dan Leo Wahyudi S. “Kambik, Sekolah Adat Suku Moi.” *Kompas*, 2024.

Koalisi Indonesia Memantau. *Menatap ke Timur: Deforestasi dan Pelepasan Kawasan Hutan di Tanah Papua*, 2021.

Perkumpulan Huma. “Salah Kaprah Hutan Adat.” HuMa, 2023.

Nesta Makuba, “Masyarakat Adat di Papua Selatan Menderita Akibat Proyek Strategis Nasional”, (Diakses pada 5 November 2024)

Project Multatuli, “Perjuangan Masyarakat Awyu Menyelamatkan Kehidupan: Menolak Melepas Hutan Adat Papua untuk Perusahaan Sawit”, (Diakses pada 5 September 2024)

Rahmawati. “Soal ‘All Eyes on Papua’, Suku Awyu: Tanah adalah Rekening Abadi Kami, Tanah adalah Mama...” *regional.kompas.com*, 2024.

United Nations of Human Rights. *Forced Evictions (Fact Sheet No. 25/Rev.1)*. New York and Geneva, 2014.

TEMPO, “*Sejarah Food Estate, Proyek Ketahanan Pangan Prabowo yang Dikritik PDIP*”, (Diakses pada 8 November 2024)

WALHI PAPUA. “WALHI PAPUA: Masyarakat Adat Papua Mendesak Perlindungan Hutan Ditengah Pembangunan Berkelanjutan,” 2025.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM**

Jalan dr. Antonius Suroso
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Tel. (024) 76918201 Faks. (024) 769185206
www.fh.undip.ac.id | email : fh[at].live.undip.ac.id

Nomor : Nota Dinas
Lampiran :
Hal : Penunjukan Dosen Pembimbing

Yth. Dr. R.B. Sularto S.H., M.Hum.
Tim Dosen Pembimbing
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Semarang

Dengan ini diberitahukan bahwa Tim Penentu Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang terdiri dari Ketua Program Studi Sarjana Hukum, Sekretaris Program Studi Sarjana Hukum, Koordinator International Undergraduate Program (IUP) dan para Ketua Bagian di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, telah menentukan Bapak/ Ibu sebagai Pembimbing Tugas Akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon bantuan Bapak/Ibu berkenan melaksanakan proses pembimbingan penulisan hukum kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : SYIFA AULIA LARASATI
NIM : 11000121130419
Bidang Minat : Hukum Pidana
Judul skripsi : KASUS PENGUSURAN HUTAN ADAT DI PAPUA DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DITINJAU DARI ASAS STRICT
LIABILITY

Pembimbing1 : Dr. R.B. Sularto S.H., M.Hum.
Pembimbing2 : Mujiono Hafidh Prasetyo S.H., M.H., LL.M.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Hukum

Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.
NIP 198310312009122003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM**

Jalan dr. Antonius Suroso
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Tel. (024) 76918201 Faks. (024) 769185206
www.fh.undip.ac.id | email : fh[at].live.undip.ac.id

Nomor : Nota Dinas
Lampiran :
Hal : Penunjukan Dosen Pembimbing

Yth. Mujiono Hafidh Prasetyo S.H., M.H., LL.M.
Tim Dosen Pembimbing
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Semarang

Dengan ini diberitahukan bahwa Tim Penentu Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang terdiri dari Ketua Program Studi Sarjana Hukum, Sekretaris Program Studi Sarjana Hukum, Koordinator International Undergraduate Program (IUP) dan para Ketua Bagian di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, telah menentukan Bapak/ Ibu sebagai Pembimbing Tugas Akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon bantuan Bapak/Ibu berkenan melaksanakan proses pembimbingan penulisan hukum kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : SYIFA AULIA LARASATI
NIM : 11000121130419
Bidang Minat : Hukum Pidana
Judul skripsi : KASUS PENGGUSURAN HUTAN ADAT DI PAPUA DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DITINJAU DARI ASAS STRICT
LIABILITY

Pembimbing1 : Dr. R.B. Sularto S.H., M.Hum.
Pembimbing2 : Mujiono Hafidh Prasetyo S.H., M.H., LL.M.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Hukum
Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.
NIP 198310312009122003<